



Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

**Nia Uzlifatun Ni'mah¹, Adinda Nur Istirohmah², Hamidaturrohmah³,
Aan Widiyono^{4*}**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

e-mail : niauzlifatun2609@gmail.com¹, aan.widiyono@unisnu.ac.id⁴

Abstrak

Pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar sangat penting adanya guna mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus sesuai potensi yang dimilikinya. Namun, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar masih mengalami permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek penyelenggaraan sekolah inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam problematika yang dihadapi sekolah dasar terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dokumen-dokumen, dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya problematika penyelenggaraan pendidikan inklusi yang meliputi aspek peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, sarana pasarana, kerjasama antara sekolah, pemerintah dan orang tua, serta pandangan masyarakat. Permasalahan utama berkaitan dengan tenaga pendidik dimana guru kelas dan guru pendamping belum memiliki pemahaman yang baik terkait pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kurangnya *support system* dari berbagai pihak seperti orang tua dan masyarakat terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: *Problematika, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar*

Abstract

Inclusive education at the primary school level is very important in order to optimize the development of children with special needs according to their potential. However, in the implementation of inclusion education at the elementary school level, there are still problems related to aspects of the implementation of inclusive schools. This study aims to examine more deeply the problems faced by elementary schools related to the implementation of inclusive education. The method used is a literature study by studying or exploring several journals, books, documents, and other data sources relevant to the research. The results showed that there are problems in the implementation of inclusive education which include aspects of students, curriculum, educators, learning activities, school management, market facilities, cooperation between schools, the government and parents, and community views. The main problem is related to educators where the class teacher and accompanying teacher do not have a good understanding of learning for children with special needs. Another problem is related to the lack of support systems from various parties such as parents and the community for the needs of children with special needs.

Keywords: *Problematics, Inclusive Education, Elementary School*

PENDAHULUAN

Banyaknya Anak Berkubutuhan Khusus (ABK) di Indonesia masih terbilang tinggi. Menurut data BPS tahun 2017 diperkirakan ada kurang lebih 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sebagian besar dari ABK ini belum mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Dilansir dari laman kemendikbud.go.id, dari 1,6 juta hanya 18% saja yang telah mendapatkan layanan pendidikan inklusi (Kompas, 2019). Mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi semua manusia tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, dan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus" dan juga secara lebih spesifik diatur dalam permendiknas nomor 70 tahun 2009 (Pratiwi, 2015). Kedua aturan inilah yang menjadi bukti kuat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di tengah masyarakat.

Secara konseptual, pendidikan inklusif adalah sistem Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan seluruh ABK mendapatkan pelayanan di sekolah umum terdekat bersama teman sebayanya. Hal ini senada dengan pernyataan Ilahi & Rose, (2013) yakni pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama dengan anak seusianya di sekolah reguler dekat dengan tempat tinggalnya. Sebelum adanya pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus ini terkesan didiskriminasi dengan menempuh jalur pendidikan khusus yaitu di SLB atau Sekolah Luar Biasa. Kehadiran SLB dinilai kurang efektif bagi perkembangan ABK karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sebayanya yang normal. Dengan bersosialisasi dengan yang lainnya, anak berkebutuhan khusus mampu mengembangkan segala potensi dan keterampilan yang ada dalam dirinya. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma pendidikan yang sebelumnya menjadi pendidikan inklusif yang tidak memandang siapa saja (Intan et al., 2020).

Pendidikan inklusif di Indonesia telah diselenggarakan mulai dari jenjang sekolah dasar. Menurut data sebaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) tahun 2021, pendidikan inklusi pada jenjang SD sebanyak 17.134 yang tersebar di 511 kab/kota (Kemendikbud, 2022). Pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus di jenjang sekolah dasar ini memang sangat penting guna meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengikuti proses pendidikan sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Namun, didalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar masih banyak mengalami permasalahan. Permasalahan utama yang terjadi di lapangan berkaitan dengan aspek-aspek penyelenggaraan sekolah inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Suka Ilmu wilayah Kabupaten Kulon Progo belum maksimal karena pelaksanaan atas 8 aspek sekolah inklusi tidak berjalan dengan optimal (Sleman, 2018). Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin, (2019) yang menyatakan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Se-Kecamatan Soko Kab.

Tuban adalah kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi siswa ABK, minimnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran, belum tersedianya ruang sumber untuk pemberian layanan khusus bagi ABK, belum adanya kurikulum plus, dan berbagai jenis ABK yang memiliki keberagaman karakteristik.

Untuk itu penting adanya pengkajian yang lebih mendalam terkait problematika apa saja yang dihadapi sekolah dasar terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, sebagai upaya untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh sekolah maupun guru dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Studi pustaka memuat pembahasan-pembahasan penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan penelitian yang dijelaskan oleh penulis (Hermawan, 2019). Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukannya, yang dilakukan para peneliti sebelumnya. Dengan demikian maka peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Peserta didik

Dalam arti luas, peserta didik adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Peserta didik merupakan subjek fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga para guru harus merasa atau menganggap bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa arti pendidikan itu sendiri adalah upaya normatif yang membawa manusia untuk merealisasikan diri (Ilahi & Rose, 2013). Permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik dalam Agustin, (2019) meliputi:

- a. ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda dan terdapat dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam melakukan pelayanan
- b. ABK mengalami Kesulitan mengikuti materi pelajaran, hal ini dikarenakan kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler sehingga perlu adanya banyak penyesuaian
- c. Sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses KBM
- d. Permasalahan siswa reguler terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK (Rizki Ailulia, 2021).

2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan inklusi pada dasarnya menganut fleksibel kurikulum, dimana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, dan dibuat dengan karakteristik dari lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri, tanpa mengesampingkan pedoman yang telah ada. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi itu sendiri hendaknya menumbuhkan kemandirian, berpikir kritis, dan dapat membangkitkan nilai-nilai kebersamaan dalam lingkungan pendidikan. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tidak seperti yang terjadi selama ini, dimana peserta didik dipaksakan mengikuti kurikulum. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurikulum pembelajaran dan penilaian belum sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulum yang sesuai dengan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum peserta didik reguler yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus (Noviandari et al., 2021).

Berdasarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Siswa yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ Bakat Istimewa dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan siswa sesuai dengan bakat, minat dan potensinya (Yuly Sakinatul Karomah, 2022). Selain itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Begitu pula dengan penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang bersangkutan. Bagi siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Bagi siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah Standar Nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Karena anak berkebutuhan khusus menggunakan standar kurikulum nasional untuk siswa reguler maka standar penilaian siswa ABK pun harus menggunakan standar penilaian siswa reguler, akibatnya anak berkebutuhan khusus tidak lulus, karena tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang bersangkutan.

3. Tenaga Pendidik.

Menurut Tarnoto, (2016) permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sekolah inklusi berdasarkan persepsi dari tenaga pendidik (guru). Permasalahan utama yang banyak dikeluhkan guru adalah:

- a. Kurangnya Guru Pendamping Kelas (GPK).
- b. Kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK, guru kesulitan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- c. Kurangnya pemahaman guru tentang ABK dan Sekolah Inklusi.
- d. Latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai.
- e. Beban administrasi yang semakin berat untuk guru.
- f. Kurangnya kesabaran guru dalam menghadapi ABK dan terakhir guru mengalami kesulitan dengan orang tua.

Permasalahan yang terjadi adalah Masih kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan guru bukan dari pendidikan luar biasa. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurikulum yang belum berorientasi disusun untuk program sekolah inklusi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus (Setianingsih & Listyarini, 2019).

4. Kegiatan Pembelajaran

Proses pembelajaran yang belum menggunakan sistem team teaching menyebabkan anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Sistem team teaching sangat diperlukan untuk menunjang koordinasi dan kerja sama antar anak-anak agar semakin kompak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Permasalahan tentang sistem pengajaran juga belum memberikan jaminan akan keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menangkap materi pembelajaran karena belum tersedianya fasilitas dan media pembelajaran (Ulfa Meila Elfiana, Aan Widiyono, 2022). Dalam proses pembelajaran diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dalam interaksi tersebut banyak faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhinya. Dalam hal ini tugas guru yang paling utama yaitu mengoptimalkan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik (Hera, 2018).

Dalam penelitian terdahulu Hera (2018) kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Metode yang digunakan saat mengajar bukan metode yang rumit namun yang diperkirakan sesuai dengan karakter siswa ABK dan siswa lain pada umumnya agar tujuan pembelajaran tercapai. Secara klasikal guru menggunakan metode yang sederhana namun memaksimalkan pemahaman

siswa dengan pelajaran walaupun tetap saja guru kelas harus mendekati siswa ABK karena memang siswa ABK di kelas atas memiliki tipe slow learner yang membutuhkan penjelasan lebih dari guru. Guru kelas juga sebenarnya kesulitan untuk memilih metode pembelajaran yang digunakan karena di kelasnya ada siswa ABK, namun guru kelas berusaha semaksimal mungkin dengan metode yang tepat agar banyak siswa yang paham dan apabila tetap ada yang belum jelas guru harus tetap telaten membimbing siswanya. Proses belajar mengajar di dalam kelas dibuat bagaimana nyamannya peserta didik, ketika dia bosan dengan posisinya dan ingin pindah tempat duduk, maka guru mengizinkan. Sumber belajar juga dibuat sedemikian rupa agar peserta didik menyukainya tentu saja dengan tanpa mengabaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan.

Tingkat kephahaman anak berkebutuhan khusus (ABK) terhadap materi pembelajaran memang berbeda-beda. Dikarenakan tingkat kecerdasan mereka pun berbeda, namun sebisa mungkin guru berusaha agar semua muridnya dapat menerima (paham) dengan materi yang disampaikan. Guru harus pandai membuat strategi yang hal itu berhubungan dengan strategi individu dalam hal pemusatan perhatian, pemecahan masalah dan lain-lain. Karena perkembangan peserta didik yang memiliki kekhususan, baik kekhususan dalam aspek fisik, emosional dan lain sebagainya itu berbeda dengan anak normal, murid yang beragam karakteristiknya juga beragam kebutuhannya sangat mengharuskan adanya perhatian dan peran dari berbagai pihak. Salah satunya perhatian dan peran dari guru sebagai tenaga pendidik yang langsung berhubungan dengan siswa (Asiyah, 2018).

5. Manajemen sekolah

Manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan pada sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah mengatur segala kebutuhan penyelenggaraan meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan hubungan dengan masyarakat (Zaini, 2022). Menurut Agustin, (2019) permasalahan terkait dengan manajemen pendidikan inklusi antara lain:

- a. Perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya.
- b. Pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program belum terjadi secara menyeluruh.
- c. Belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi dan SDM.
- d. Proses KBM yang belum berjalan maksimal, selama ini ABK belum mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi.

6. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusif di satuan pendidikan tertentu (David Wijaya, 2019). Keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia memegang peranan penting bagi anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka akan sangat bergantung pada media pembelajaran. Setiap ABK mempunyai beragam karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga pihak sekolah inklusif juga perlu menyiapkan berbagai macam media pembelajaran. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama karena sebagian besar sekolah inklusif belum mampu menyediakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Agustin, 2019). Selain itu, keberadaan media pembelajaran adaptif belum dipergunakan secara maksimal dan hanya terdapat media biasa untuk peserta didik reguler sedangkan tidak adanya media khusus untuk peserta didik ABK agar lebih mudah memahami pembelajaran (Hera, 2018).

7. Kerjasama

Aspek kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan pemerintah dan wali murid. Menurut Nurcahyani (dalam Intan et al., 2020) memaparkan bahwa peran aktif dari pemerintah masih kurang terhadap pelaksanaan sekolah inklusi, diantaranya:

- a. Kebijakan terkait pelaksanaan sekolah inklusi belum jelas.
- b. Belum adanya modifikasi kurikulum khusus sekolah inklusi, kurangnya pelatihan tentang pendidikan inklusi kepada guru.
- c. Perhatian pemerintah terhadap tenaga profesional yang mendukung sekolah inklusi kurang baik dari segi jumlah dan kesejahteraannya.
- d. Program yang dilakukan pemerintah belum berkelanjutan.
- e. Belum ada lembaga khusus yang menangani pelatihan pendampingan ABK.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi juga berkaitan dengan kerja sama antara pihak sekolah dengan wali murid. Wali murid yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keluarga. Peran keluarga juga sangat membantu dalam mewujudkan keberhasilan pembelajaran bagi peserta didik, khususnya ABK (Widiyono, 2022). Namun, pada kenyataannya sebagian besar orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus kurang mampu memberikan pendampingan belajar bagi anaknya di rumah. Mereka rata-rata disibukkan oleh karir dan pekerjaan di luar rumah, sehingga intensitas interaksi antara orang tua dan anak kurang (Khotimah, 2019). Masalah lain yang muncul diantaranya kurangnya pemahaman orang tua terhadap ABK, adanya rasa malu dari orang tua sehingga membuat mereka menempatkan anaknya di sekolah reguler, kurangnya rasa toleransi dari wali murid siswa reguler terhadap ABK, kurangnya rasa sabar dari orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dan pengasuhan orang tua tunggal (Intan et al., 2020).

8. Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi jenjang pendidikan, profesi, dll akan memberikan respon yang berbeda pula terhadap keberadaan anak yang berkebutuhan khusus. Secara umum, masih terdapat masyarakat yang melihat dan mempunyai tanggapan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh, sehingga pada saat mereka berhadapan atau bertemu dengan ABK di lingkungan masyarakat, mereka akan memilih cuek akan beradaan ABK bahkan sampai menghindarinya. Hal tersebut dapat menjadi bukti nyata bahwa kurangnya perhatian serta kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus sebab adanya pandangan negatif yang melekat dalam masyarakat luas (Intan et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar adalah terkait dengan 8 komponen peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, kerjasama dan masyarakat serta kurangnya prasarana yg mendukung sekolah inklusi. Permasalahan yang ada juga dikarenakan kurang adanya kerjasama berbagai pihak contohnya pada pemerintah atau dinas terkait dan orang tua wali murid. Komponen utama pada penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah tenaga pendidik. Pemerintah dan forum terkait wajib berkomitmen untuk menaikkan kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus, supaya sanggup dalam melaksanakan proses pembelajaran yg efektif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, bersedia mengembangkan kurikulum plus berdasarkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dan bisa membangun kerjasama yg baik dengan orang tua wali. Hal ini juga di dukung kemampuan forum sekolah dalam menjalin kerjasama dengan dinas terkait pemerintah, menyiapkan sarana prasarana yg mendukung sehingga dapat melakukan pelayanan terbaik terhadap anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2019). Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN Se Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(2), 17–26.
- Asiyah, D. (2018). Dampak pola pembelajaran sekolah inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 1(01).
- David Wijaya, S. E. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Prenada Media.
- Hera, E. (2018). Permasalahan Sekolah Dasar Inklusi Di Kelas Atas SD Suka Ilmu Wilayah Kabupaten Progo. In *Skripsi*.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.

- Ilahi, M. T., & Rose, K. R. (2017). *Pendidikan inklusif: konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Arruz Media
- Intan, I., Jaya, G. P., & Jamaludin, G. M. (2020). Problematika Guru Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Sd Inklusi Taman Siswa Rejang Lebong. *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)*, 3(2), 113–126.
- Kemendikbud. (2022). *Data Sebaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) Jenjang SD*. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/data-sebaran-satuan-pendidikan-penyelenggara-pendidikan-inklusif-spppi-jenjang-sd>
- Khotimah, H. (2019). Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 5(2), 84–103.
- Kompas. (2019). *Hari Disabilitas Internasional, Nadiem: Guru Harus Paham Prinsip Pendidikan Khusus*. <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2019/12/03/07150021/hari-disabilitas-internasional-nadiem-guru-harus-paham-prinsip-pendidikan>
- Noviandari, H., Masrurroh, F., & Psy, M. P. (2021). *Cooperative Positive Learning Dalam Pendidikan Inklusi*. Penerbit Lakeisha.
- Pratiwi. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Tanggapan Terhadap Tantangan Ke depannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (pp. 237-242). Surakarta: UNS&ISPI Jawa Tengah
- Rizki Ailulia, A. W. (2021). Studi Kasus : Penangan Masalah School refusal melalui Teknik Self Instruction pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Indonesia*, 7(1), 29–38.
- Setianingsih, E. S., & Listyarini, I. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di Sd Bina Harapan Semarang. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 257–268.
- Sleman, D. (2018). *Penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas Di Sekolah*.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 13(1), 50–61.
- Ulfa Meila Elfiana, Aan Widiyono, E. Z. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Pop Up Book Alim (Alat Indra Manusia) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 4 Tunahan Jepara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 523–527. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Widiyono, A. (2022). Kegiatan Cooking Class untuk Menumbuhkan Kemandirian dan Tanggung Jawab. *PRATAMA WIDYA : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 59–68.
- Yuly Sakinatul Karomah, A. W. (2022). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosi Siswa. *SELING Jurnal Program Studi PGRA*, 8(1), 54–60.